

ANALISIS VARIABEL YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI INDONESIA

Muhammad Mada¹

Khusnul Ashar²

1. *Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

Email: mada_muhammad@yahoo.com, khusnul_ashar@yahoo.co.id

Abstract

The growth of a large population is not matched by the spread evenly and lack of labor market led to a reduction in the chance of getting a job. This leads to insecurity and did not rule out the emergence of crime. Besides the prolonged economic crisis also worsened the problems facing the government in developing the field of employment. Unemployment in Indonesia experienced by almost the whole of society with different strata of each level of education. The problem in this research is how economic factors affect the level of unemployment in Indonesia. In addition, factors that influence the success of one's education in obtaining a job or not getting work is a phenomenon in society in Indonesia later by the authors defined as a formulation problem in this study. This study uses several variables that allow in this study include level of education, age of the workforce, as well as economic factors were then analyzed quantitatively. Data analysis tool in this study with correlation used by the author as a step to address the problem in this study. The purpose of this study was to determine the factors that affect the educated unemployment in Indonesia. The benefits of this research that this study are expected to provide a good education in general and specifically in economics about the factors affecting unemployment in Indonesia, especially in Kalanga educated. In addition this study is expected to be a reference for further research and as a reference to the central government and regency / municipal government in determining policies for many people to Indonesia more dignified, advanced, and prosperous.

Keywords: Population, Employment, Unemployment

JEL Classification: J62, J64

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan setiap sektor seperti sektor pertanian, industri, bisnis, energi, transportasi yang semuanya memerlukan tenaga kerja tangguh.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan penyebaran secara merata dan kurangnya pasar kerja menyebabkan berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini menyebabkan timbulnya kerawanan dan

tidak menutup kemungkinan timbulnya tindak kejahatan. Untuk melihat gambaran mengenai jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar, dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk (000)
2000	206.262
2001	208.407
2002	212.000
2003	215.276
2004	216.372
2005	217.898
2006	221.200
2007	220.950

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup besar dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Jumlah penduduk Indonesia yang pada sensus penduduk terakhir sebesar 206 juta jiwa dengan waktu tujuh tahun dapat menambah jumlahnya menjadi 220 juta jiwa.

Oleh karena itu maka masalah kependudukan terutama jumlah tenaga kerja yang memasuki pasaran kerja harus diusahakan untuk disalurkan kelapangan kerja yang ada agar tidak menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Disisi lain, krisis ekonomi yang berkepanjangan juga semakin memperburuk masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Ada kesepakatan umum yang mengatakan bahwa pengangguran adalah “struktural”, dalam pengertian bahwa ada ketidaksesuaian antara jenis pekerja yang ditawarkan dengan jenis pekerja yang dibutuhkan oleh perekonomian.

Kebanyakan individu-individu yang menganggur adalah orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sementara itu permintaan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi meningkat pesat. Ketidaksiesuaian ini telah terjadi bertahun-tahun tetapi kebijakan yang dilakukan untuk menutup defisit keterampilan dalam perekonomian melalui penyediaan pendidikan bermutu tinggi sangat kurang atau bisa dibilang tidak ada. Pada saat yang bersamaan perubahan struktur mengambil alih perekonomian. Di negara-negara berkembang, perubahan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian menjadi ekonomi yang didominasi oleh sektor industri menjadi salah satu langkah paling populer menuju percepatan pertumbuhan termasuk di Indonesia.

Perubahan struktur yang menitikberatkan pada proses produksi yang padat modal. Proses produksi yang lebih menitikberatkan pada kemajuan teknologi lebih lanjut akan meningkatkan permintaan terhadap para pekerja yang berketerampilan tinggi dengan mengorbankan para pekerja yang kurang terampil (Pauw, 2006).

Proses industrialisasi yang dilakukan secara masal yang mengakibatkan permintaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan serta spesialisasi juga semakin meningkat tersebut menuntut peran sekolah serta lembaga-lembaga pendidikan yang lebih. Dengan adanya peningkatan pendidikan diharapkan tingkat keterampilan tenaga kerja semakin baik sehingga bisa diserap oleh sektor industri sekaligus memperbaiki tingkat pendapatan (Yustika, 2002).

Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada.

Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan, adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi juga berdampak pada perubahan karakteristik angkatan kerja di Indonesia seperti pada tabel 1.2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 13 persen. Pertumbuhan tersebut pada kelompok umur tidak ada perubahan yang sangat berarti yaitu rata-rata 20 persen pada setiap kelompok umur pada pertumbuhan angkatan kerja antara tahun 2000 dan 2007. Angkatan kerja juga semakin terdidik selama periode tersebut. Dengan mengacu pada kebijakan pendidikan dasar 9 tahun, jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SD menurun 4,5 persen dari total pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Sisanya 56,7 persen berpendidikan SMP serta 47,8 persen berpendidikan tinggi (SMA, Diploma/Akademi, dan Perguruan Tinggi).

Tabel 2 Karakteristik Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan, 2000 dan 2007

	2000		2007		Perubahan	
	000	Share	000	Share	000	Share
15 - 24	19.874	26,7	22.757	31,0	2.883	11,5
25 - 34	25.847	27,0	28.574	26,8	2.727	21,9
35 - 44	22.877	23,9	25.103	23,2	2.228	17,9
45 - 54	15.040	15,7	17.956	16,6	2.916	23,4
55 +	12.054	12,8	13.740	12,7	1.686	13,1
total	95.652	100	108.132	100	12.480	100
SD	57.258	59,9	56.766	52,4	-558	-4,5
SMP	15.783	16,1	22.415	20,7	7.672	56,7
SMA	18.591	19,4	22.347	20,7	3.756	30,1
Akademi / Diploma	2.144	2,2	2.751	2,5	619	5,0
Universitas	2.295	2,1	3.886	3,6	1.591	12,7
total	95.652	100	108.132	100	12.480	100

Sumber : Disnakertrans (diolah)

Dengan adanya perubahan komposisi dalam angkatan kerja berakibat pada perubahan komposisi jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2000 dan 2007 seperti tercantum pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 3 Karakteristik Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2000 dan 2007

	2000		2007		Perubahan	
	000	Share	000	Share	000	Share
SD	55.820	62,13	53.281	51,60	-2.539	-32,79
SMP	13.905	15,58	19.792	20,28	5.797	74,84
SMA	15.045	17,85	18.502	19,05	2.557	33,01
Akademi / Diploma	1.939	2,18	2.443	2,49	474	6,12
Universitas	2.019	2,25	3.476	3,56	1.457	18,81
Total	89.838	100	97.583	100	7.745	100

Sumber : Disnakertrans (diolah)

Dengan pola perubahan pada komposisi angkatan kerja serta pada komposisi penduduk yang bekerja, yaitu semakin terdidiknya angkatan kerja dan penduduk yang bekerja bukan berarti permasalahan ketenagakerjaan pada umumnya serta pengangguran pada khususnya dengan sendirinya akan terselesaikan. Melainkan terjadi pula perubahan komposisi pengangguran terbuka pada kurun waktu yang sama. Seperti terlihat dalam tabel dibawah:

Tabel 4 Karakteristik Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan, 2000 dan 2007

	2000		2007		Perubahan	
	000	Share	000	Share	000	Share
15 - 24	3.037	67,7	5.788	54,9	1.851	39,1
25 - 34	1.431	31,6	2.839	27,1	1.408	30,2
35 - 44	276	4,7	1.042	9,9	766	16,2
45 - 54	131	2,9	521	5,2	420	8,9
55 +	38	0,7	308	2,9	270	5,7
Total	5.813	100	10.548	100	4.735	100
SD	1.438	24,7	3.420	32,4	1.982	41,9
SMP	1.968	33,8	2.642	25,1	1.275	26,9
SMA	2.546	43,8	4.713	44,7	1.199	25,3
Akademi / Diploma	185	3,2	330	3,1	145	3,1
Universitas	276	4,7	410	3,9	134	2,8
Total	5.813	100	10.548	100	4.735	100

Sumber : Disnakertrans (diolah)

Dari Tabel 4 di atas dapat diambil informasi bahwa jumlah pengangguran terbuka meningkat sebesar 81 persen. Dengan partisipasi tertinggi pada kelompok umur 15-24 yaitu sebesar 39 persen dari total pertambahan. Diikuti sebesar 30 persen dari total pertambahan yaitu pada tingkat umur 25-34. Dengan kata lain bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh angkatan kerja usia muda, yaitu sebesar 69 persen pada kelompok umur 15-34 tahun. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penganggur terbuka lulusan pendidikan dasar (SD dan SMP) merupakan penyumbang terbesar yaitu 69 persen dari total pertambahan.

Pada angkatan kerja terdidik partisipasinya sebesar 31 persen dari total perubahan. Meskipun partisipasi pengangguran terdidik cenderung menurun dari tahun 2000 ke tahun 2007 yaitu SMA dari 43,8 persen menjadi 25,3 persen, Akademi/Diploma dari

3,2 persen menjadi 3,1 persen serta Universitas dari 4,7 persen menjadi 2,8 persen namun pada tingkat pengangguran sebenarnya meningkat hampir 18 persen dari 13,06 persen pada tahun 2000 menjadi 15,47 persen pada tahun 2007 seperti ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini.

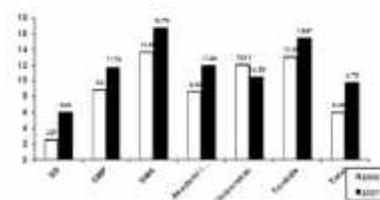
Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2000 dan 2007

	SD	SMP	SMA / Akademi / Diploma	Universitas	Terdidik	Total
2000	2,31	8,90	13,80	8,63	12,03	13,06
2007	6,04	11,78	16,76	11,91	10,55	15,47

Sumber : Disnakertrans (diolah)

Meski jumlah angkatan dengan tingkat pendidikan tinggi sedikit, bukan berarti semua dapat terserap oleh pasar kerja. Ada dua hal yang menyebabkan mereka tidak terserap formasi kerja. Pertama, formasi kerja memang memiliki bentuk geometri piramida. Artinya, semakin tinggi skill (keahlian) yang dimiliki, makin sedikit lowongan yang tersedia. Kedua, banyak lowongan kerja yang tersaji tidak dapat dipenuhi angkatan kerja terdidik karena tidak dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan lowongan kerja. Banyak lowongan kerja yang tersedia tetapi sebagian besar lowongan tersebut tidak dapat terisi, terutama lowongan dengan kualifikasi pendidikan atau keahlian setara perguruan tinggi (Wirakartakusumah 1998).

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2000 dan 2007



Sumber: BPS (2008), diolah

Di samping itu tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah persaingan dunia kerja. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan siap kerja secara besar-besaran yang diikuti meledaknya tenaga kerja produktif, maka persaingan semakin tajam. Padahal daya tampung lapangan kerja di Indonesia sangat terbatas. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik sampai pada tingkat titik jenuh, kemudian diperparah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, maka lapangan kerja semakin sempit (Fathoni).

Rumusan masalah

Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar dari waktu ke waktu, mengakibatkan bertambah pula jumlah angkatan kerjanya. Dengan demikian apabila masalah ini tidak diimbangi dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan pengangguran.

Selain itu pula, dengan tingginya pertumbuhan ekonomi sebelum krisis berakibat pada peningkatan taraf hidup serta kebutuhan akan pendidikan yang semakin meninggi. Sehingga membuat semakin banyaknya jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi, sedangkan lapangan kerja yang ada terbatas dan semakin berkurang akibat krisis serta standar penerimaan tenaga kerja di penyedia kerja yang berbeda-beda, serta kebijakan tentang pengupahan yang cenderung kaku menimbulkan fenomena baru yaitu tenaga kerja terdidik.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

- Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap jumlah pengangguran terdidik di Indonesia?

- Variabel mana yang paling dominan terhadap jumlah pengangguran terdidik di Indonesia?

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PNB riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan ta-

nah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi.

Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto (PDB) adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi

dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. PDB Nominal digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar yaitu tahun dimana keadaan ekonomi sedang stabil. PDB riil digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Besarnya PDB dapat dihitung menggunakan pengukuran arus sirkular (*circular flow*). Cara pengukuran tersebut dibagi menjadi tiga metode yaitu:

- a. Metode Total Keluaran (*the total-output method*) merupakan jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- b. Metode Pengeluaran atas Keluaran (*the spending-on-output method*) yaitu jumlah pengeluaran konsumsi komponen permintann akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, pemerintah dengan pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

- c. Metode Pendapatan dari Produksi (*the income-from production method*) adalah jumlah nilai tambah (produk) yang dihasilkan unit-unit produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Upah

Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah adalah bayaran bagi para pekerja dan bayaran bagi para pekerja dalam satu periode tertentu dinamakan tingkat upah. Sedangkan tingginya tingkat upah bisa dikatakan asal mencukupi atau dengan kata lain adalah kewajaran, yang mengandung banyak makna di dalamnya, sehingga terdapat banyak pendapat apa dan bagaimana upah yang wajar tersebut.

Beberapa Teori Tentang Upah yang Wajar

Thomas Robert Malthus salah seorang tokoh mahdzab klasik berpendapat bahwa upah ditinjau dari kaitannya dengan perubahan penduduk. Upah adalah harga penggunaan tenaga kerja oleh karena itu tingkat upah yang terjadi karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang tentunya berasal dari penduduk. Bila penduduk bertambah, penawaran kerja juga bertambah. Dan berlaku sebaliknya, sehingga berpengaruh pada tingkat upah yang diberlakukan.

Dari penganut mahdzab klasik lainnya John Stuart Mills menyimpulkan bahwa tingkat upah tidak akan terlalu beranjak dari tingkat semula. Menurutnya dalam masyarakat tersedia dana upah (*wage funds*) untuk pembayaran upah. Bila dunia mengadakan investasi pasti sebagian dari dana itu diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat investasi sudah dilaksanakan jumlah dana tersebut sudah tertentu, jadi tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pandangan madzab klasik tentang upah yang wajar ini adalah pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkatan yang rendah (Sudarsono).

Sedangkan menurut Karl Marx menekankan pada dua hal, yakni teori nilai yang berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai sesuatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua adalah teori pertentangan kelas yang berpendapat bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Sehingga penawaran tenaga kerja menjadi melimpah yang berakibat pada tingkat upah yang rendah.(Simanjuntak)

Berbeda dengan pesimisme teori klasik yang berpendapat bahwa tingkat upah akan berada pada tingkatan yang rendah. Neoklasik berpendapat yang intinya adalah bahwa tingkat upah bisa saja tinggi asal sesuai dengan produk marginalnya. Tingkat upah cenderung sama dengan nilai produk marginalnya. Sehingga tingkat upah tidak sama untuk semua tingkat tenaga kerja tetapi berbeda berdasarkan kualitas tenaga kerja tersebut.

Pengangguran

Menurut Soeroto pengangguran dalam pengertian makro ekonomi adalah sebagai angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro pengangguran adalah seseorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan.

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. (Wikipedia).

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Dengan demikian apa yang dimaksud pengangguran adalah suatu keadaan di mana orang-orang atau tenaga kerja yang mau serta mampu melaksanakan pekerjaan, tetapi tidak dapat terlaksana karena ada sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang berlaku.

Selanjutnya menurut Departemen Tenaga Kerja jenis pengangguran adalah sebagai berikut

1. Pengangguran penuh (PP), mereka yang mencari pekerjaan dan tidak bekerja sama sekali, seperti baru masuk melamar, putus kerja dan lain-lain.
2. Pengangguran tidak penuh (PTP) adalah:
 - a. Mereka yang punya pekerjaan tetapi tidak sedang bekerja
 - b. Mereka yang bekerja kurang dari sepertiga jam kerja normal (JKN) dan bersedia menerima pekerjaan (Depnaker)

Definisi pengangguran berbeda-beda dari setiap pakar antara satu dengan yang lain. Maka untuk lebih jelasnya akan dikemukakan jenis-jenis pengangguran dibedakan menurut sebab terjadinya dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu pengangguran friksional, struktural dan musiman.

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi.

Pengangguran struktur adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan di dalam struktur ekonomi yang berasal dari faktor tertentu seperti perubahan teknologi terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dan pekerja yang menganggur karena penganggur tersebut tidak mempunyai kemampuan yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan itu.

Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Di luar musim panen banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis. Mereka hanya sekedar me-

nunggu musim yang baru. (Payaman JS.). Di samping masalah tingginya angka pengangguran, yang termasuk juga rawan adalah pengangguran tenaga terdidik, yaitu angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja.

Pengangguran terdidik adalah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dan tidak bekerja. Jika didasarkan pada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, maka golongan terdidik adalah golongan di mana telah menempuh kewajiban pendidikan dasar dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di sejumlah negara berkembang, terjadi hubungan positif antara pengangguran dan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Penyebab dari situasi ini adalah bahwa mereka yang tidak terdidik tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka kalau tidak bekerja, sehingga mereka mau melakukan apa saja untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, meskipun hanya bekerja secara terbatas. Sedangkan bagi yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, mereka hanya mau bekerja kalau pekerjaan itu memberi uang, status, atau kepuasan yang relatif tinggi (Todaro, 2000).

Secara kualitatif, kualitas tenaga kerja nasional meningkat disebabkan dua hal. Pertama, pembangunan ekonomi pada tingkat tertentu berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat lebih mampu membiayai pendidikan formal dan mengakomodasi makanan bergizi yang membantu kualitas tenaga kerja. Kedua, berbagai kebijakan di bidang pendidikan nasional membawa peningkatan pada kualitas pendidikan formal angkatan kerja. Akan tetapi, pada saat angkatan kerja terdidik

meningkat dengan pesat, lapangan kerja masih didominasi sektor-sektor subsistensi yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan (Elwin Tobing). Ini menimbulkan gejala *supply induce* di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pen-dayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. Secara makro ini juga disebabkan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) tidak diikuti transformasi penyerapan tenaga kerja.

Tampaknya gejala tersebut diakibatkan pola perkembangan industri saat ini yang kurang berbasis pada permasalahan nasional yang sifatnya seolah *labor surplus* padahal karena permintaan yang kecil. Dengan demikian, di samping membangun industri skala besar yang sifatnya padat modal dan teknologi, perhatian juga sudah seharusnya diberikan pada pengembangan industri yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak hanya jumlahnya besar tetapi juga tumbuh dengan sangat cepat (Tobing, 2005).

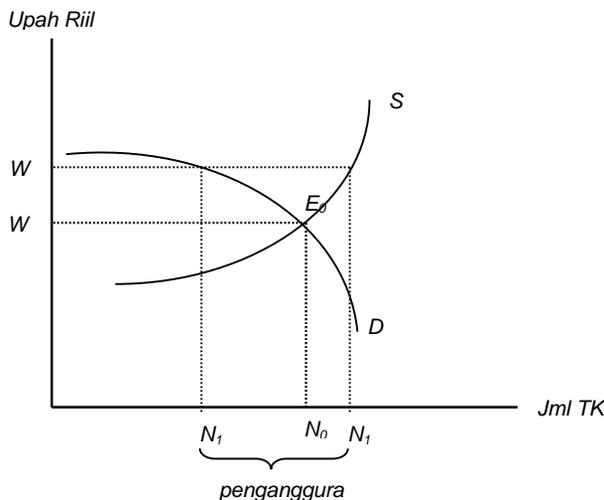
Hubungan Upah dan Pengangguran

Asumsi dasar ekonomi klasik adalah perekonomian selalu ada dalam keadaan atau kondisi *full employment*. Yaitu bahwa siapa yang ingin bekerja akan mendapatkan pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan memperoleh sejumlah yang diinginkan. Jadi pengangguran adalah orang-orang yang memang sengaja untuk menganggur (Wirakartakusumah, 1998). Jikapun ada pengangguran terpaksa itu karena pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan mekanisme pasar. Situasi yang dimaksud adalah ketika terjadi rigiditas upah, yaitu upah nominal dianggap mudah

naik tapi tidak bisa turun. Kekakuan upah didorong oleh dua hal yaitu serikat pekerja dan peraturan pemerintah. Seperti tertera dalam gambar.

Jika mekanisme pasar tanpa adanya intervensi pemerintah yang menyebabkan kekakuan upah, kondisi keseimbangan adalah pada tingkat upah W_0 jumlah tenaga kerja yang diminta N_0 yang sesuai dengan asumsi klasik yaitu terjadi full employment. Karena pemerintah menetapkan upah sebesar W_1 terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Jumlah orang yang ingin bekerja bertambah dari N_0 menjadi N_1 , sedangkan permintaan tenaga kerja berkurang dari N_0 menjadi N_1^* . Jadi jumlah orang yang ingin bekerja lebih tinggi daripada lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya terjadi pengangguran yaitu sebesar $N_1^* - N_1$

Gambar 2. Pengangguran Akibat Kekakuan Upah



Sumber: Tobing (2005)

3 METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah selalu dimulai dengan suatu perencanaan yang seksama. Maka dalam perencanaan dan pelaksanaan diperlukan suatu rancangan penelitian yang sebaik-baiknya. Rancangan penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel dalam penelitian yang dibuat sedemikian rupa dan berguna untuk membantu peneliti dalam memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

Rancangan penelitian bertujuan untuk memberi suatu pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil dalam rangka menyelesaikan suatu masalah secara efektif.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari serangkaian observasi yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Sedangkan berdasarkan sumbernya penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Data-data yang diambil adalah *data cross section* di mana merupakan data hasil pencatatan dalam satu waktu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari, memahami, mengklasifikasi dan menggunakan sumber data sekunder yang telah diperoleh dari organisasi atau badan tertentu maupun dari literatur, artikel, jurnal, maupun situs dari internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan.

Teknik Analisis Data

Model Linier Berganda

Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tak bebas, pada lebih dari satu variabel yaitu variabel bebas dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tak bebas apabila variabel bebasnya sudah diketahui.

Model regresi berganda memiliki formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Dimana

Y : variabel dependen

β_1 : nilai intersep Y

β_2, \dots, β_n : koefisien arah regresi

X_2, \dots, X_n : variabel

ε : random error

Dari model regresi berganda yang ada pada penelitian ini memiliki formula untuk model regresi berganda sebagai berikut:

$$ptd = 1 + 2 \text{ pop} + 3 \text{ wage} + 4 \text{ growth} +$$

Dimana

ptd : jumlah pengangguran terdidik

growth : pertumbuhan ekonomi

pop : jumlah penduduk

wage : upah

β : konstanta

ε : random error

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah parameter bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), artinya keefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti, maka dilakukan uji asumsi klasik:

- Multikolinieritas
- Autokorelasi
- Heteroskedastisitas
- Normalitas

Multikolinearitas

Suatu model dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi (Gujarati). Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Cara mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu:

Nilai R^2 yang dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasarkan uji t-statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan. Metode yang dikemukakan oleh Farrar dan Glauber ini dilakukan karena diduga bahwa multikolinearitas timbul karena satu atau lebih variabel penjelas merupakan kombinasi yang linear yang pasti atau mendekati pasti dari variabel penjelas lainnya. Dengan cara memperhatikan nilai R^2 yang ditemukan setelah dilakukan estimasi, kemudian dengan menghitung nilai F-hitung dengan menggunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R_{xt}^2}{1 - R_{xt}^2} \times \frac{(n - k)}{k - 1}$$

Dimana

R_{xt} : nilai R^2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel penjelas

N : jumlah data (observasi)

K : jumlah variabel penjelas

Bila nilai F -hitung < F -tabel berarti bahwa salah satu atau lebih variabel penjelas tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang lain yang artinya tidak ada multi-kolinearitas dan sebaliknya.

Atau dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF); *Tolerance* dan VIF adalah ukuran pendeteksian gejala terjadinya multi-kolinearitas dimana

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

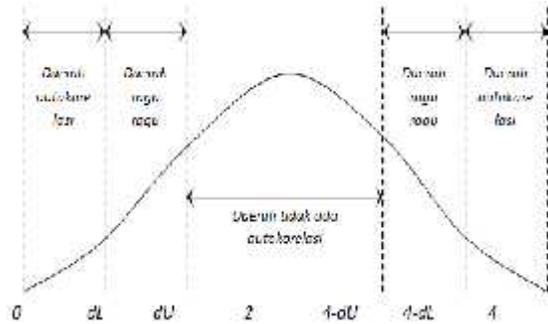
Jika $VIF > 10$ maka terjadi multi-kolinearitas.

Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang dilakukan untuk menguji asumsi bahwa data harus bersifat bebas, yaitu dalam pengertian bahwa data periode tertentu tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi data periode sebelumnya ataupun pada periode sesudahnya.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Model terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah tidak ada

autokorelasi yang dilihat dari nilai dL dan dU dan $4-dU$ dan $4-dL$.



Pedoman ada tidaknya autokorelasi. Bila nilai DW terletak antara 0 dan dL , berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW terletak antara $4-dL$ dan 4, berarti ada autokorelasi negatif. Bila nilai DW terletak antara dL dan dU atau $4-dU$ dan $4-dL$, hasilnya tidak dapat disimpulkan, baik terjadi autokorelasi positif atau negatif. Atau biasa disebut daerah ragu-ragu. Bila nilai DW terletak antara dU dan $4-dU$, berarti tidak ada autokorelasi.

Heteroskedastis

Dalam ekonometrika situasi dimana varian dari faktor pengganggu atau error term adalah sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas atau sering disebut homoskedastisitas. Sedangkan heteroskedastisitas adalah varian dari faktor pengganggu atau error term tidak sama untuk setiap nilai variabel bebas.

Akibat yang ditimbulkan oleh heteroskedastisitas ada beberapa hal yang dimungkinkan berdampak pada perhitungan dan penerapan heteroskedastisitas. Akibat tidak konstannya varian, maka salah satu dampak yang ditimbulkan adalah lebih besarnya varian dari taksiran. Lebih besarnya varian taksiran akan berpengaruh terhadap uji hipotesis yang dilakukan sehingga uji hipotesis menjadi kurang benar. Lebih besarnya varian taksiran akan meng-

akibatkan standar error taksiran juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi sangat besar. Akibat beberapa dampak tersebut maka kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dibuat dapat menyesatkan.

Untuk mengetahui apakah suatu model terkena heteroskedastisitas atau tidak dapat digunakan dua metode yaitu menggunakan grafik dan menggunakan korelasi *spearman*. Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode grafik didasarkan pada persebaran data, jika persebaran data membentuk suatu pola maka dapat disimpulkan bahwa model terkena heteroskedastisitas tapi jika persebaran data tidak membentuk pola maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena heteroskedastisitas.

Penggunaan korelasi *spearman* dalam mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan cara mengkorelasikan nilai residual dengan prediktor. Jika nilai koefisien korelasi *spearman* mempunyai nilai yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut terkena heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Normalitas

Untuk penerapan OLS untuk model linier klasik, diasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari error term. Asumsi yang dibuat bahwa faktor pengganggu mempunyai nilai rata-rata yang diharapkan adalah sama dengan nol, tidak berkorelasi, dan mempunyai varian yang konstan.

Ada beberapa uji untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan antara lain dengan JB test. Uji ini menggunakan hasil estimasi *residual chi square probability distribution*.

Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual dengan membandingkan nilai JB hitung (X^2_{hitung}) dengan X^2_{tabel} . Bila JB hitung > nilai X^2_{tabel} maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal ditolak.

Bila JB hitung < nilai X^2_{tabel} maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dimana JB hitung dapat dicari dengan

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Di mana S adalah skewness dan K adalah kurtosis.

Uji statistik (uji signifikansi)

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan atau serentak terhadap variabel independen. Rumus yang digunakan yaitu:

$$F_{statistik} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(N-k-1)}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

Adapun H_0 dan H_1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : bahwa variabel jumlah penduduk pertumbuhan ekonomi dan upah tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.

H₁: bahwa variabel jumlah penduduk pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesa adalah sebagai berikut:

Bila F statistik > F_{tabel} maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, Artinya variabel-variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, bila Fstatistik < F_{tabel} maka H₀ diterima dan H₁ ditolak .

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk menunjukkan besarnya sumbangan (share) dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dapat dilihat melalui koefisien determinasi berganda (R²), dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum ei^2}{\sum ey^2}$$

Di mana:

ei² merupakan jumlah kuadrat residual

ey² merupakan jumlah total kuadrat

R² mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0 < R² < 1) dimana semakin besar R² atau semakin mendekati 1, maka makin bagus atau makin tepat garis regresi tersebut.

Koefisien determinasi tersebut mempunyai dua kegunaan, yaitu :

Sebagai determinan ukuran ketepatan atau kecocokan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi. Dimana makin besar R² makin bagus garis regresi, sebaliknya makin kecil R² makin tidak tepat garis regresi

terseut untuk mewakili data hasil observasi, dimana nilai R² antara 0 sampai 1.

Untuk mengukur proporsi atau prosentase dari jumlah variabel dependen yang diterangkan oleh garis regresi atau untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel independen terhadap naik turunnya nilai variabel dependen.

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai t hitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$t_{statistik} = \frac{\hat{S}_i - S_i}{Se(\hat{S}_i)}$$

Di mana

\hat{S}_i : koefisien dari variable ke i

S_i : nilai hipotesa

$Se(\hat{S}_i)$: simpangan baku dari variable ke i

Hipotesa dalam pengujian ini adalah

- H₀: variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.
- H₁: variabel jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.
- H₀: variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.

- H_1 : variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.
- H_0 : variabel upah tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.
- H_1 : variabel upah berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik.

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesa H_0 adalah sebagai berikut

Jika t statistik $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya jika H_0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu variabel yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dan jika t statistik $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti variabel yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000 adalah 205,1 juta jiwa, tidak mencakup penduduk tidak bertempat tinggal tetap sebesar 421.399 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduk bertambah menjadi 218,9 juta jiwa dan pada tahun 2007 menjadi 225,6 juta jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup cepat sejak tahun 1980. Laju pertumbuhan penduduk dari 1,97 persen selama periode 1980-1990 menjadi 1,45 persen selama periode 1990-2000 menurun lagi pada periode 2000-2006 sebesar 1,34 persen.

Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak di-

imbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Sebagian besar penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Pada tahun 2006 sebesar 56 persen penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Pulau Jawa, yaitu 18 persen di Jawa Barat, 15 persen di Jawa Tengah, dan 16 persen bertempat di Jawa Timur.

Keadaan Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi gerakannya roda pembangunan. Jumlah dan komposisinya akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Keadaan angkatan kerja di Indonesia yang tercatat dalam badan pusat statistik Indonesia tahun 2007 dapat dilihat dalam Tabel 6 di bawah:

Tabel 6 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia, 2007

Keadaan Ketenagakerjaan	Jumlah
Angkatan Kerja	107.594.283
Penduduk yang Bekerja	97.583.141
Pengangguran	10.011.142

Sumber: Badan Pusat Statistik (2007)

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2007 adalah sebesar 107.594.283 jiwa dengan pembagian sebesar 97.583.141 jiwa adalah penduduk angkatan kerja yang sudah bekerja sedangkan sisanya yaitu sebesar 10.011.142 jiwa adalah penduduk yang belum terserap oleh pasar kerja dengan kata lain menganggur.

Komposisi angkatan kerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dan tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Desa-Kota, 2007

Pendidikan	Desa	Kota	Jumlah	Desa (%)	Kota (%)
< SD	11.000.138	14.992.995	25.993.133	61,78	33,81
SMP	12.806.969	9.248.996	22.055.965	30,21	30,88
SMA	7.699.671	14.971.496	22.671.167	13,16	31,80
Diploma/Akademi	366.201	1.864.048	2.230.249	1,33	4,21
Universitas	820.539	1.221.850	2.042.389	1,10	7,27
AK Terdidik	2.485.791	20.059.394	22.545.185	14,99	45,28
Jumlah	58.292.898	44.301.385	102.594.283	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2007)

Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas angkatan kerja di wilayah pedesaan adalah angkatan kerja yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah yang ditunjukkan dengan hanya menamatkan sekolah pada tingkat Sekolah Dasar yaitu sebesar 64,78% dari total angkatan kerja yang ada di desa. Sedangkan pada daerah perkotaan persebaran angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan cenderung seimbang dengan komposisi 33,84% hanya lulusan SD, 20% menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP sedangkan sisanya sebesar 45,28% adalah angkatan kerja terdidik, yang tingkat pendidikan minimalnya adalah tingkat SMA. Sedangkan komposisi penduduk yang bekerja dapat dilihat dalam Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Desa Kota Tahun 2007

Lapangan Pekerjaan Utama	Desa	Kota	Jumlah	Desa (%)	Kota (%)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	18.550.359	1.374.313	19.924.672	61,78	11,00
Pertambangan dan Penggalian	661.413	507.473	1.168.886	1,10	0,85
Industri Pengolahan	1.213.698	7.151.091	8.364.789	8,87	17,99
Elektrik, Gas dan Air	60.547	114.548	175.095	0,10	0,29
Bangunan	2.709.850	2.001.731	4.711.581	1,19	6,12
Perdagangan Besar, Perantara, Rumah Makan dan Hotel	7.983.104	12.571.348	20.554.452	13,27	31,81
Angkutan, Penyediaan Listrik dan Komunikasi	3.468.647	3.152.188	6.620.835	1,00	8,93
Kecamatan, Administrasi dan Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1.001.750	1.167.013	2.168.763	0,39	2,98
Jasa Kemasyarakatan	4.063.781	7.958.201	12.021.982	6,76	20,00
Total	60.155.975	58.770.144	118.926.119	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2007)

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sebanyak 61% dari total penduduk yang bekerja pada daerah pedesaan bekerja pada sektor tersebut. Selanjutnya prosentase terbesar kedua ada pada sektor perdagangan, baik besar maupun eceran, rumah makan dan perhotelan yaitu sebanyak 13%. Sisanya sebanyak 26% masyarakat pedesaan bekerja pada sektor yang bervariasi seperti pertambangan, bangunan, angkutan serta jasa.

Pada masyarakat perkotaan, sektor lapangan kerja utama yang dipilih sangat beragam, mengingat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu pada sektor perdagangan yaitu sebesar 31% diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 20%, industri pengolahan sebesar 17% serta pertanian sebesar 11%. Sisanya tersebar di

sektor- sektor lainnya seperti pertambangan, listrik, bangunan, angkutan dan keuangan. Komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan dan domisili dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah:

Tabel 9 Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Desa-Kota, 2007

Pendidikan	Desa	Kota	Jumlah	Desa (%)	Kota (%)
< SD	1.640.645	1.071.967	2.712.612	37,40	19,06
SMP	1.171.504	1.092.694	2.264.198	26,71	19,43
SMA	1.322.821	2.747.732	4.070.553	30,16	48,85
Diploma/ Akademi	127.965	269.226	397.191	2,92	4,79
Universitas	123.674	442.914	566.588	2,82	7,87
Gol. Terdidik	1.574.460	3.459.872	5.034.332	35,89	61,51
Jumlah	4.386.609	5.624.533	10.011.142	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2007)

Dari Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja yang menganggur pada daerah pedesaan lebih banyak ditempati oleh angkatan kerja yang hanya tamatan pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 37,4%. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang lain yaitu 26,71% berpendidikan SMP dan angkatan kerja terdidik sebesar 30,16% yang didominasi oleh angkatan kerja lulusan SMA sedangkan pada tingkat pendidikan diploma dan universitas hanya menyumbang masing-masing 2,92% dan 2,82%.

Pada daerah perkotaan, lebih dari 50% jumlah penganggur didominasi oleh angkatan kerja terdidik dengan kontribusi terbesar yaitu angkatan kerja berpendidikan SMA sebesar 48,85% sedangkan pada tingkat pendidikan Diploma dan Universitas menyumbang 4,79% dan 7,87%. Selebihnya

19% adalah angkatan kerja yang tingkat pedidikannya hanya SD atau dibawahnya dan 19,43% adalah angkatan kerja berpendidikan SMP.

2. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

• Model Estimasi

Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini maka perlu dilakukan estimasi dengan menggunakan model estimasi uji regresi linier berganda, sehingga dalam estimasi harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan model estimasi, dalam hal ini model estimasi dirumuskan sebagai berikut:

$$ptd_total = 1 + 2 \text{ pop} + 3 \text{ wage} + 4 \text{ growth} +$$

$$ptd_kota = 1 + 2 \text{ pop} + 3 \text{ wage} + 4 \text{ growth} +$$

$$ptd_desa = 1 + 2 \text{ pop} + 3 \text{ wage} + 4 \text{ growth} +$$

Dimana

ptd_total : pengangguran terdidik

ptd_desa : pengangguran terdidik di kota

ptd_kota : pengangguran terdidik di desa

pop : jumlah penduduk

$wage$: upah minimum

$growth$: pertumbuhan ekonomi

: konstanta

: random error

Ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berpengaruh nyata terhadap

variabel pengangguran terdidik, baik secara total, pada daerah perkotaan ataupun pada daerah pedesaan.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi tersebut maka perlu dilakukan uji asumsi klasik, untuk mengetahui apakah parameter bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara semua variabel bebas yang terdapat dalam suatu regresi.

Multikolinearitas diuji dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) bilai nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel 10a Uji Multikolinearitas Untuk Model Pengangguran Terdidik Total

Variabel Bebas	Nilai VIF	Keterangan
pop	1,259	Non Multikolinearitas
wage	1,320	Non Multikolinearitas
growth	1,055	Non Multikolinearitas

Tabel 10b Uji Multikolinearitas untuk Model Pengangguran Terdidik Kota

Variabel Bebas	Nilai VIF	Keterangan
pop	1,259	Non Multikolinearitas
wage	1,320	Non Multikolinearitas

growth	1,055	Non Multikolinearitas
--------	-------	-----------------------

Tabel 10c Uji Multikolinearitas untuk Model Pengangguran Terdidik Desa

Variabel Bebas	Nilai VIF	Keterangan
pop	1,259	Non Multikolinearitas
wage	1,320	Non Multikolinearitas
growth	1,055	Non Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF dari tiga model yang ada, untuk semua variabel bebas kurang dari 10, ini berarti tidak ada hubungan linier yang sempurna antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Normalitas

Metode untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor gangguan salah satunya dengan menggunakan Jarque-Bera test, uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan X^2 probability distributor. Apabila besarnya JB test lebih kecil dibandingkan X^2 tabel (0,05) maka model yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

Selain menggunakan metode JB test, dapat digunakan juga metode Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 maka fungsi distribusinya berdistribusi normal.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk model pertama yaitu pengangguran terdidik total, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,717 dan angka probabilitasnya sebesar 0,682 sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan berdistribusi normal.

Untuk model kedua, pengangguran terdidik kota. Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,079 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,198, maka dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan berdistribusi normal.

Dan hasil pengujian untuk model ketiga yaitu pengangguran terdidik desa, angka Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,744 dan probabilitasnya sebesar 0,638 sehingga dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode DW test. Model dikatakan terkena autokorelasi apabila Nilai dw terletak diantara $4-dL - 4$ (autokorelasi negatif) atau $0 - dL$ (autokorelasi positif). Bila nilai dw terletak diantara $dL - dU$ atau $4-dU - 4-dL$ merupakan daerah ragu-ragu. Model tidak terkena autokorelasi apabila terletak diantara $dU - 4-dU$.

Berdasarkan hasil pengujian didapat nilai dw sebesar 1,879. Sedangkan besarnya dw tabel dengan jumlah data sebanyak 33, jumlah variabel bebas = 3 dengan $\alpha = 5\%$ adalah $dL = 1,256$ dan $dU = 1,651$ sehingga didapat nilai $4-dL = 2,742$ dan $4-dU = 2,349$. Dengan demikian nilai dw terletak diantara dU dan $4-dU$ atau $dU < DW < 4-dU$ ($1,651 < 1,879 < 2,349$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengalami autokorelasi baik positif maupun positif.

Untuk pengujian yang sama, didapat nilai dw sebesar 1,269, untuk model regresi desa. Yang berarti terletak diantara dL dan dU atau ($dL < DW < dU$) demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan

terletak di daerah ragu-ragu apakah terdapat autokorelasi atau tidak.

Sedangkan untuk model regresi kota, nilai DW sebesar 2,030. Dengan demikian nilai dw terletak diantara dU dan $4-dU$ atau $dU < DW < 4-dU$ ($1,651 < 2,030 < 2,349$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengalami autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *rank Spearman* yaitu mengkorelasikan absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti model bebas dari heteroskedastisitas. Hasil penghitungan uji korelasi *rank spearman* dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 11a Uji Rank Spearman untuk Regresi Pengangguran Terdidik Total

Variabel	Signifikansi	Keterangan
pop	0,073	Non-hetero
wage	0,975	Non-hetero
growth	0,724	Non-hetero

Tabel 11b Uji Rank Spearman untuk Regresi Pengangguran Terdidik Kota

Variabel	Signifikansi	Keterangan
pop	0,699	Non-hetero
wage	0,411	Non-hetero
growth	0,412	Non-hetero

Tabel 11c Uji Rank Spearman untuk Regresi Pengangguran Terdidik Desa

Variabel	Signifikansi	Keterangan
pop	0,561	Non hetero
wage	0,725	Non hetero
growth	0,647	Non hetero

wage	0,25	2,74	0,0104
growth	4332,63	0,81	0,4229
R2 = 0,894			
Adj R2 = 0,883			
F stat = 81,485			
Prob (F stat) = 0,0000			

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa model tidak terkena asumsi heteroskedastisitas karena hasil korelasi dari semua model lebih besar dari 0,05.

Hasil Uji Statistik (Uji Signifikansi)

Setelah dilakukan estimasi uji linier berganda dari tiga model regresi, didapatkan hasil seperti terlihat dalam tabel dibawah:

Tabel 12a Hasil Estimasi untuk Regresi Pengangguran Terdidik Total

Variabel	Koefisien	t-stat	Probability
(Constant)	-171430,22	-2,53	0,017
pop	0,02	23,75	0,000
wage	0,23	2,99	0,006
growth	2441,198	0,529	0,601
R2 = 0,957			
Adj R2 = 0,952			
F stat = 213,406			
Prob (F stat) = 0,0000			

Tabel 12c Hasil Estimasi untuk Regresi Pengangguran Terdidik Desa

Variabel	Koefisien	t-stat	Probability
(Constant)	26831,65	0,72	0,4780
pop	0,01	11,78	0,0000
wage	-0,01	-0,32	0,7520
growth	-1891,385	-0,743	0,463
R2 = 0,860			
Adj R2 = 0,846			
F stat = 59,504			
Prob (F stat) = 0,0000			

Dapat disimpulkan bahwa koefisien regresinya:

$$ptd_total = -171430,22 + 0,02 \text{ pop} + 0,23 \text{ wage} + 2441,20 \text{ growth} +$$

$$ptd_kota = -198261,94 + 0,02 \text{ pop} + 0,25 \text{ wage} + 4332,63 \text{ growth} +$$

$$ptd_desa = 26831,65 + 0,01 \text{ pop} + -0,01 \text{ wage} + -1891,39 \text{ growth} +$$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa:

Bila pop, wage, growth bernilai 0 maka ptd_total sebesar -171430,22 dan ptd_kota sebesar -198261,94 sedangkan ptd_desa sebesar 26831,65. Bila pop meningkat sebesar satu satuan dan variabel

Tabel 12b Hasil Estimasi untuk Regresi Pengangguran Terdidik Kota

Variabel	Koefisien	t-stat	Probability
(Constant)	-198261,94	-2,53	0,0169
pop	0,02	14,94	0,0000

bebas lainnya tetap maka ptd_total meningkat sebesar 0,02, ptd_kota sebesar 0,02 sedangkan ptd_desa sebesar 0,01.

Bila growth meningkat sebesar satu satuan dan variabel bebas lainnya tetap maka ptd_total meningkat sebesar 2441,20, ptd_kota sebesar 4332,63 sedangkan ptd_desa menurun sebesar 1891,39. Bila wage meningkat sebesar satu satuan dan variabel bebas lainnya tetap maka ptd_total meningkat sebesar 0,23, ptd_kota sebesar 0,25, sedangkan ptd_desa menurun sebesar 0,01.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dari pengujian model didapat nilai F hitung sebesar 213,406 untuk model pertama, 81,485 untuk model kedua dan 59.504. Nilai probabilitas dari ketiga model yaitu sebesar 0,000. Sedangkan nilai F tabel $N = 33$, dan $k = 3$ dan $\alpha = 0,05$ adalah sebesar 3,32.

Dengan hasil diatas dapat diketahui bahwa dari ketiga model tersebut nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variable jumlah penduduk, upah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik baik total, di kota maupun di desa.

Uji R

Uji R dilakukan untuk menunjukkan besarnya hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari model pertama, pengangguran terdidik total diperoleh nilai adj R2 sebesar 0,952 atau 95,2%. Artinya 3 variabel bebas secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengangguran terdidik yaitu sebesar 95,2% sedangkan 4,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Untuk model kedua, pengangguran terdidik perkotaan, diperoleh nilai adj R2 sebesar 0,883 atau sebesar 88,3%. Yang berarti 3 variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengangguran terdidik perkotaan sebesar 88,3% sedangkan 11,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Sedangkan untuk model ketiga, pengangguran terdidik di daerah pedesaan, diperoleh nilai adj R2 sebesar 0,846 atau sebesar 84,6%. Artinya 3 variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengangguran terdidik di daerah pedesaan yaitu sebesar 84,6% sedangkan 15,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari estimasi untuk ketiga model yang telah dilakukan maka diperoleh nilai sebagai berikut.

Tabel 13a Hasil Uji T untuk Pengangguran Terdidik

variabel	t-tabel	t-stat	prob	Keterangan
pop	2,042	23,75	0,000	Signifikan
wage	2,042	2,99	0,006	Signifikan
growth	2,042	0,529	0,601	Tidak signifikan

Tabel 13b Hasil Uji T untuk Pengangguran Terdidik di Kota

variabel	t-tabel	t-stat	prob	Keterangan
----------	---------	--------	------	------------

pop	2,042	14,94	0,000	Signifikan
wage	2,042	2,74	0,0104	Signifikan
growth	2,042	0,81	0,4229	Tidak signifikan

Tabel 13c Hasil Uji T untuk Pengangguran Terdidik di Desa

variabel	t-tabel	t-stat	prob	Keterangan
pop	2,042	11,78	0,000	Signifikan
wage	2,042	-0,32	0,752	Tidak signifikan
growth	2,042	-0,743	0,463	Tidak signifikan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik baik total, di perkotaan maupun di pedesaan. Variabel upah juga berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pengangguran terdidik, tetapi hanya pada model pengangguran terdidik total dan di perkotaan. Sedangkan di pedesaan variabel upah tidak berpengaruh. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi, dari ketiga model didapatkan hasil yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik.

Pembahasan Hasil Estimasi

Dari analisa data yang menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan upah secara serentak atau secara keseluruhan mempengaruhi variabel terikatnya yaitu jumlah pengangguran terdidik baik secara total, pada daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Sedangkan secara individu atau parsial variabel jumlah penduduk dan upah pada model pertama dan kedua (pengangguran terdidik total dan pengangguran terdidik di kota) berpengaruh pada variabel terikatnya. Sedangkan pada model ketiga,

pengangguran terdidik di desa hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh signifikan sedangkan dua variabel lainnya tidak berpengaruh. Dan untuk variabel pertumbuhan ekonomi, untuk ketiga model yang di uji tidak signifikan secara statistik.

Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (POP) Terhadap Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dari hasil estimasi, dicatat bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh nyata (signifikan secara statistik) terhadap jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Baik secara total, di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu penentu bertambahnya jumlah pengangguran terdidik.

Dari hasil penghitungan menunjukkan koefisien nilai regresi bertanda positif. Yang bermakna bahwa ada hubungan positif antara jumlah penduduk dan jumlah pengangguran terdidik. Jika jumlah penduduk bertambah akan berpengaruh pada peningkatan jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Karena peningkatan jumlah penduduk pada akhirnya akan berakibat pada peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada. Dengan asumsi lowongan kerja yang tersedia tetap maka akan semakin menambah jumlah pengangguran pada umumnya tak terkecuali jumlah pengangguran terdidik.

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Growth) Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia

Dari hasil estimasi, variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik. Baik secara total, di perkotaan dan di pedesaan.

Hal ini disebabkan bahwa lapangan kerja yang berperan terhadap besarnya PDB ada pada sektor-sektor padat modal. Sedangkan untuk sektor padat karya semakin mengalami penurunan tiap tahunnya. Seperti terlihat dalam Tabel 14 di bawah, kontribusi sektor padat karya seperti pertanian dan sebagian industri terhadap PDB semakin menurun dari 14,5% pada tahun 2005 untuk pertanian menjadi hanya 13,8% pada tahun 2007. Begitu juga pada sektor industri yang pada tahun 2005 berkontribusi sebesar 28% menjadi 27,4% pada tahun 2007. Sedangkan pada sektor-sektor perdagangan, keuangan, dan jasa mengalami peningkatan kontribusi dalam kurun 2005-2007.

Dengan besarnya kontribusi yang disumbangkan sektor-sektor padat modal, maka permintaan terhadap tenaga kerja akan semakin berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserap oleh pasar kerja dan jumlah angkatan kerja yang menganggur.

Tabel 14 : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2005-2007

Lapangan Usaha	2005		2006		2007	
	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%	Miliar Rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	233,382	14,30	262,403	14,20	271,587	13,83
Pertambangan dan Pengalihan	163,223	9,11	168,029	9,10	171,382	8,73
Industri Pengolahan	451,761	28,08	514,100	27,83	538,078	27,10
Elektrik, Gas, dan Air Bersih	11,581	0,66	12,251	0,65	13,325	0,69
Konstruksi	103,398	5,92	112,231	6,08	121,901	6,21
Perdagangan, Hotel dan Restoran	293,614	16,77	312,521	16,93	348,046	17,96
Angkutan dan Komunikasi	109,262	6,21	124,876	6,77	142,913	7,28
Keuangan, Real Estat & Jasa Perantara	161,252	9,21	190,374	9,21	183,658	9,35
Jasa Kemasyarakatan	160,099	9,18	190,005	9,24	181,977	9,20
Produk Domestik Bruto	1.740.813	100	1.847.293	100	1.969.934	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Upah (Wage) Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia

Dari hasil estimasi, dicatat bahwa upah berpengaruh nyata terhadap jumlah pengangguran terdidik di Indonesia. Namun hanya pada model pertama dan kedua (pengangguran terdidik total dan pengangguran terdidik di kota. Sedangkan pada model ketiga (pengangguran terdidik di desa) variabel upah tidak berpengaruh signifikan.

Koefisien nilai regresi bertanda positif berarti bahwa ada hubungan positif antara upah dengan jumlah pengangguran terdidik. Jika upah tinggi akan berakibat pada jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Dan sebaliknya, jika upah turun jumlah pengangguran terdidik akan berkurang. Hasil ini sejalan dengan teori permintaan tenaga kerja. Dimana jika tingkat upah tinggi atau dinaikkan akan berakibat pada permintaan tenaga kerja akan berkurang dengan kata lain penyedia lapangan kerja akan meminta lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan sebelumnya. Akibatnya jumlah pengangguran yang semakin bertambah.

Sedangkan untuk hasil estimasi model ketiga yaitu upah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik di daerah pedesaan dapat dikarenakan karena beberapa sebab, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawa.

Tabel 15 Jumlah Penduduk Desa yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Desa	Desa (%)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	36.832.359	61,23

Pertambangan dan Penggalian	661.641	1,10
Industri Pengolahan	5.213.698	8,67
Listrik, Gas dan Air	60.342	0,10
Bangunan	2.700.850	4,49
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	7.983.304	13,27
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.406.643	4,00
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	232.475	0,39
Jasa Kemasyarakatan	4.063.761	6,76
Total	60.155.073	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2007)

Tabel 16 Jumlah Penduduk Desa yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama dan tempat Tinggal

Status Pekerjaan Utama	Desa	Desa (%)
Berusaha Sendiri	10.935.303	18,18
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	16.378.116	27,23
Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar	1.334.503	2,22
Buruh/Karyawan/Pegawai	9.868.720	16,41
Pekerja Bebas di Pertanian	4.984.352	8,29
Pekerja Bebas di Non Pertanian	2.591.795	4,31
Pekerja Tak Dibayar	14.062.284	23,38
Jumlah	60.155.073	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2007)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut status pekerjaannya, masyarakat desa kebanyakan berusaha dibantu rumah tangga, pekerja tak dibayar atau berusaha sendiri.

Sedangkan dari jenis pekerjaannya, kebanyakan dari mereka sebagai tenaga usaha pertanian. Jenis-jenis pekerjaan itu dalam sistem pengupahannya tidak berdasarkan sistem pengupahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan upah minimum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel upah tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik di daerah pedesaan.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, upah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik baik total, di kota maupun di desa.
2. Berdasarkan Uji t dapat diketahui bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik baik total, di perkotaan maupun di pedesaan. Variabel upah juga berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik, tetapi hanya pada model pengangguran terdidik total dan di perkotaan. Sedangkan di pedesaan variabel upah tidak berpengaruh. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik. Baik secara total, di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini disebabkan bahwa lapangan kerja yang berperan terhadap

besarnya PDB ada pada sektor-sektor padat modal. Sedangkan untuk sektor padat karya semakin mengalami penurunan tiap tahunnya. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan semakin banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

4. Variabel upah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik di daerah pedesaan dapat dikarenakan beberapa hal, yaitu kebanyakan penduduk desa berpendidikan rendah sehingga bekerja pada sektor-sektor informal yang tidak menerapkan kebijakan upah minimum dan pada sektor pertanian yang pengupahannya berdasarkan produktifitas.

SARAN

Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran terdidik secara umum dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan upah meskipun tidak secara mutlak dapat dibuktikan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu

1. Hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dan pengangguran terdidik akan menjadi permasalahan tersendiri jika tanpa ada penanganan. Diperlukan pengendalian pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tekanan pada penawaran tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah penduduk yang menganggur.
2. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor-sektor padat modal dan sektor yang membutuhkan keterampilan khusus berakibat jumlah angkatan kerja yang terserap terbatas. Selain perlu dibuka lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja, juga diperlukan peran aktif dari para tenaga kerja terdidik untuk membuka

peluang kerja baru baik bagi individu-individu itu sendiri tetapi juga untuk orang lain.

3. Jumlah pengangguran terdidik yang lebih banyak terdapat di daerah perkotaan menunjukkan bahwa selain tingkat pendidikan yang rendah di daerah pedesaan juga tenaga-tenaga kerja terdidik di daerah pedesaan lebih banyak yang bermigrasi ke perkotaan yang lebih banyak menawarkan jenis pekerjaan formal. Untuk mengurangi jumlah migrasi diperlukan pengelolaan potensi yang optimal di pedesaan secara modern sehingga merangsang untuk para tenaga kerja terdidik di daerah pedesaan untuk tidak bermigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. Eviews 3.0 (Economic Software). Malang : Semi Que FE UB.
- Aziz, Sri Woelan. 1996. Aspek Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia. Surabaya : Citra Media Karya Anak Bangsa.
- Badan Pusat Statistik. 2000. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2000. Jakarta:BPS
- , 2000. Statistik Indonesia 2000. Jakarta : BPS
- , 2001. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2001. Jakarta:BPS
- , 2002. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2002. Jakarta:BPS
- , 2003. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2003. Jakarta:BPS

- , 2004. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2004. Jakarta:BPS
- , 2005. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2005. Jakarta:BPS
- , 2005. Statistik Indonesia 2005. Jakarta : BPS
- , 2006. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2006. Jakarta:BPS
- , 2006. Statistik Indonesia 2006. Jakarta : BPS
- , 2007. Keadaan Tenaga Kerja di Indonesia 2007. Jakarta:BPS
- , 2007. Statistik Indonesia 2007. Jakarta : BPS
- Bakir, Zainab dan Chris Manning (ed). 1984. Angkatan Kerja di Indonesia Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran. Jakarta: CV Rajawali.
- Brooks, Ray. 2002. Why Is Unemployment High in the Philippines? IMF Working Paper
- Dhanani, Shafiq. 2004. Unemployment and Underemployment in Indonesia 1976-2000 : Paradoxes and Issues. Geneva : International Labor Office.
- Effendi, Riestaf. 2006. Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. Tidak dipublikasikan. Skripsi (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Fathoni, Abdul Halim. 2006. Membaca Ulang Pendidikan di Indonesia, Telaah Prospek dan Arah Pemasaran Lulusan Perguruan Tinggi (<http://www.penulislepas.com/v2/?p=159>)
- Gujarati, Damodar. 1995. Basic Econometric. Singapore. Mc Graw Hill.
- Heathfield, David and Mark Russel. 1992. Modern Economics. Glasgow : Harvester Wheatsheaf
- Idris, Nasrullah. 2002. Fenomena Pengangguran Terdidik. (<http://www.mail-archive.com/permiass@listserv.syr.edu/msg12927.html>)
- Kartasaputra. 1994. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kuncoro, Sudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Manullang, Sendjun H. 1990. Pokok-pokok Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nachrowi, Nachrowi D dan Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Oosthuizen, Morne. 2006. The Post-Apartheid Labor Market : 1995-2004. South Africa : Development Policy Research Unit.

- Pauw, Kalie, Morne Oosthuizen and Charlene van der Westhuizen. 2006. Graduate Unemployment in the Face of Skills Shortage : A Labor Market Paradox. South Africa : Development Policy Research Unit.
- Rizki, Aji Rahman. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. Tidak dipublikasikan. Skripsi (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soelistiyo. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Soeratno. 2001. Metodologi Riset Khusus. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sudarsono. 1988. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Karunika
- Suwignyo, Agus. 2006. Penganggur Lulusan Universitas.
(<http://agussuwignyo.blogspot.com/2006/09/24/penganggur-lulusan-universitas/trackback/>)
- Syahril, Nurrohman. 2005. Peran Perguruan Tinggi Mengatasi Pengangguran. (www.pikiran-rakyat.com)
- Tobing, Elwin. 2005. Pendidikan, Pasar Tenaga Kerja dan Kewiraswastaan. (www.theindonesianinstitute.org)
- 2005. Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik. (www.theindonesianinstitute.org,)
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga
- Wirakartakusumah, Djuhari. 1998. Bayang Bayang Ekonomi Klasik. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. Pembangunan dan Krisis. Memetakan Perekonomian Indonesia. Jakarta : Grasindo